



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018 - 2022

**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan taufik-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 - 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2018-2022, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Renja dan LAKIP SKPD, serta menjadi dasar penilaian kinerja kepala SKPD.

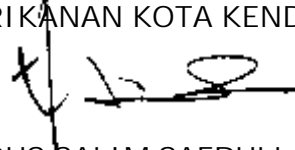
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 – 2022 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi SKPD.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 – 2022 ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi peningkatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Kendari di masa-masa yang akan datang.

Kendari,

2018

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA KENDARI,



Ir. AGUS SALIM SAFRULLAH, MS

Pembina Tk.I, Gol IV/b

NIP. 19670817 199203 1 019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sitematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	5
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
LAMPIRAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun (2017-2022) dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas, berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017-2022 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; Persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022 diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Kendari yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kelautan dan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Kendari, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan nasional dan khususnya di Kota Kendari merupakan salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Kendari sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di pusat dan kebijaksanaan pembangunan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga kota dan urusan pembantuan yang diberikan oleh pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2012 sampai Tahun 2017 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2018 – 2022, maka SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan ke dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Periode 2017 – 2022, terutama meneruskan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan dan penyusun kebijakan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. Selain itu, bahwa arah pembangunan kelautan dan Perikanan Kota Kendari harus dapat mendukung visi pembangunan kota kendari yaitu **“Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi Informasi Dan Teknologi”**

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
4. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2008 – 2012
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017 - 2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan perikanan dan kelautan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan dan Kelautan antar wilayah, antar sektor serta lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017 - 2022 adalah :

1. Sebagai Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan Kota Kendari.
2. Merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Kendari dalam kurun waktu 2017 – 2022 yang berkaitan dengan rencana pembangunan kelautan dan perikanan;
3. Penguatan peran serta stekholders dalam pelaksanaan rencana kerja.
4. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sitematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (2) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (4) pembinaan terhadap UPTD lingkup dinas; (5) pelaksanaan administrasi dinas, dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2016, terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan, Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Kepala Bidang Usaha Budidaya dan Pembenihan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) masing-masing dipangku oleh seorang Kepala, yaitu terdiri dari :

1. Kepala UPTD TPI-PPI Kendari
2. Kepala UPTD TPI-PPS Kendari
3. Kepala UPTD BBIAT Kota Kendari
4. Kepala UPTD PIH Kota Kendari

Masing-masing Bidang membawahi beberapa Sub Bagian dan Seksi, yaitu :

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan
 - b. Seksi Produksi, Kemitraan Usaha dan IPTEK
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
3. Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan TPI, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan
 - b. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
4. Bidang Usaha Budidaya dan Pembenihan, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Prosuksi dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - c. Pengelolaan Unit Pembenihan
5. Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan membawahkan 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 – 2022

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (2) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (4) pembinaan terhadap UPTD lingkup dinas; (5) pelaksanaan administrasi dinas, dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan program kerja, LAKIP, SOP, evaluasi kinerja dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan RPJMD dan RKPD;
- c. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, ketatalaksanaan dan urusan pengelolaan kepegawaian.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan bidang pemberdayaan dan kelembagaan usaha perikanan.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, sarana dan prasarana serta kelembagaan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, sarana dan prasarana serta kelembagaan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengolah ikan dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan administrasi, data dan statistic produksi perikanan tangkap, data kenelayan dan pembudidaya ikan serta data sarana kapal dan alat tangkap ikan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan, kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan;

- g. Pembinaan kelembagaan dan kelompok-kelompok usaha nelayan dan pembudidaya ikan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan Usaha Perikanan terdiri atas 3 (tiga) seksi dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;

- a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan bertugas:
 - 1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis nelayan kecil, pengolah ikan dan pembudidayaan ikan;
 - 2. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bagi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 3. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- b. Seksi Produksi, Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertugas:
 - 1. Melaksanakan pengumpulan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - 2. Melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan produksi hasil tangkapan ikan, perlindungan nelayan melalui asuransi dan kemitraan usaha dengan lembaga permodalan atau koperasi perikanan serta Kelompok Usaha Bersama (KUB);
 - 3. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 4. Mengumpulkan data teknis, identifikasi, inventarisasi, penerapan teknologi anjuran, monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi penangkapan maupun budidaya perikanan.
- c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana bertugas:
 - 1. Melaksanakan pengumpulan data kelembagaan (Koperasi perikanan, kelompok nelayan dan pembudidaya ikan), data nelayan dan pembudidaya ikan, sarana kapal dan alat tangkap ikan serta sarana dan prasarana budidaya ikan;

2. Melaksanakan identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan kelembagaan, serta penyiapan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya ikan;
3. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan keembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan TPI

Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah dan pencatatan usaha perikanan, pembinaan mutu produk serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan penertiban Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah dan pencatatan usaha perikanan lainnya;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu produk, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

- a. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan bertugas:
 1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, serta pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan jumlah investasi dan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil bertugas :
 1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu produk (konsumsi dan non-konsumsi);
 2. Melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan industry pengolahan, usaha kecil menengah dan kelompok usaha bersama pengolahan hasil perikanan serta usaha promosi bidang perikanan.
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan bertugas:
 1. Melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Menyediakan data dan informasi jenis usaha pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan;
 4. Melaksanakan pengumpulan data, jumlah sarana dan prasarana nelayan dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan

Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan.

Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data dan informasi pengelolaan budidaya ikan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan (air laut, air payau dan air tawar), pengelolaan kesehatan ikan, dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan;
- e. Pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

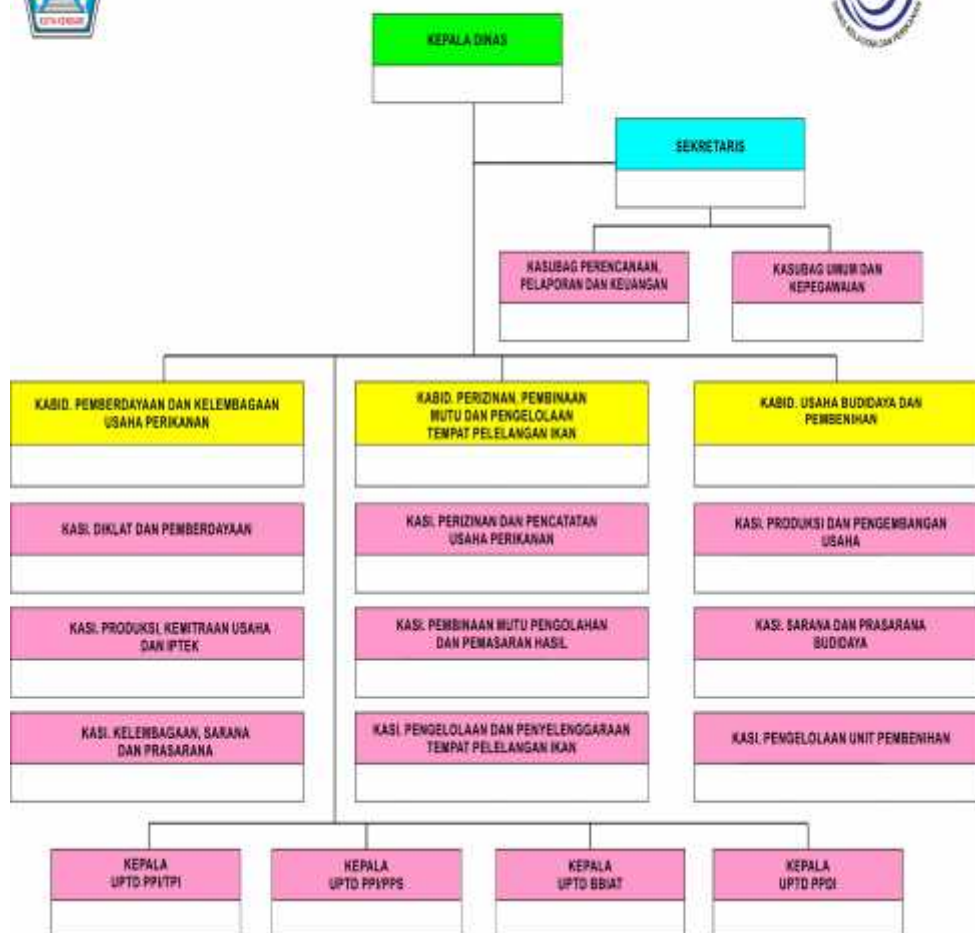
Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan, membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan.

- a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis bidang produksi dan pengembangan usaha. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
 1. Melaksanakan pengumpulan data produksi dan data potensi/luas areal pengembangan usaha budidaya ikan (air tawar, payau dan laut);
 2. Melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 3. Melaksanakan penyediaan data dan informasi jenis usaha pengelolaan pembudidayaan ikan (air tawar, payau dan laut);
 4. Menyediakan data dan informasi jenis usaha pengelolaan pembudidayaan ikan (air tawar, payau dan laut).

- b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana budidaya. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya menyelenggarakan fungsi:
1. Melaksanakan kegiatan rencana dan program kerja seksi sarana dan prasarana budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan) yang digunakan pembudidaya ikan;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan) yang digunakan pembudidaya ikan;
 4. Melaksanakan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan) yang digunakan pembudidaya ikan;
- c. Seksi Pengelolaan Unit Perbenihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Unit Perbenihan. Seksi Pengelolaan Unit Perbenihan menyelenggarakan fungsi:
1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, dan/atau benih ikan, unit perbenihan skala rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan;
 2. Melaksanakan analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik, penyediaan calon induk, dan/atau benih ikan, unit perbenihan skala rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan;
 3. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, dan/atau hatchery skala rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan, baik ikan air tawar, air payau maupun air laut.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI



2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari sampai akhir tahun 2017 didukung oleh sebanyak 53 orang pegawai, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan eselon.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	3
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	IV/a	11
5	Kepala UPTD	IV/a	4
6	Fungsional	-	-
7	Staf PNS Gol. IV	-	0
8	Staf PNS Gol. III		28
9	Staf PNS Gol. II		4
10	Staf PNS Gol. I		1
11	Staf PHT (Honorar)	-	17

Tabel 2.2. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH							KET
			S2	S1	D1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	II/b	1		-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	III/a	1		-	-	-	-	-	
3	Kepala Bidang	III/b	2	1	-	-	-	-	-	
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	IV/a	3	8	-	-	-	-	-	
5	Kepala UPTD	IV/a	1	-	-	1	1	-	-	
6	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Staf PNS	-	4	25	-	-	5	-	-	
8	Staf PHT	-	-	6		2	5	-	-	

2.2.2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari di didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran seperti Gedung Kantor, Kendaraan Operasional Roda Empat dan Dua, Meja Kerja, Kursi Kerja, Komputer/Laptop, Lemari, Pesawat telepon/fax serta sarana prasarana perkantoran lainnya.

Tabel 2.3. Jumlah dan Jenis sarana perkantoran berupa peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017.

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Lemari Arsip	6	6	-	
2.	Brankas	1	1	-	
3.	Meja Biro	6	6	-	
4.	Kursi Biro	6	6	-	
5.	Kursi kerja	61	58	3	
6.	Meja ½ Biro	52	50	2	
7.	Proyektor	2	2	-	
8.	Rak Buku	4	4	-	
9.	Note book	9	8	1	
10.	Kipas Angin	3	1	2	
11.	AC	8	8	-	
12.	Printer	10	8	2	

13.	Meja Rapat	22	22	-	
14.	Kursi Rapat	22	22	-	
15.	Amplifiler	2	2	-	
16.	Horden jendela	22	22	-	
17.	Handy Talky	6	6	-	
18.	Kamera	2	2	-	
19.	PC (komputer)	8	6	2	
20.	Refraktometer	1	1	-	

Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Asset berupa Gedung/Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017.

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung Kantor DKP	1	1	-	DAK
2.	Gedung UPTD BBI	2	2	-	DAK
3.	Gedung UPTD TPI/PPI	4	4	-	DAK
4.	Depo Rumput Laut	1	1	-	DAK
5.	Bangsai Pelelangan	2	2	-	DAK/APBN
6.	Depo Rumput Laut	1	1	-	DAK
7.	Dermaga/Tambatan	1	1	-	DAK
8.	Kios Pemasaran	2	2	-	DAK
9.	Gedung Kantor PIH	1	-	1	APBN
10.	Gedung PPDI	1	1	-	APBN
11.	Gedung Koldstorage	2	2	-	APBN
12.	Pabrik Tepung Ikan	1	1	-	APBN

Tabel 2.5. Daftar Asset Tanah Yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017.

No.	Uraian	Luas (m2)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	6
1.	Lahan BBIAT	11.000	Kel. Rahandouna	
2.	Lahan TPI/PPI	12,000	Kel. Sodohoa	
3.	Lahan Depo Rumput Laut	10.000	Kel. Tondonggeu	
4.	Lahan PPDI	10.000	Kel. Sanua	

Tabel 2.6. Jumlah Asset Kendaraan Bermotor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2017.

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Mini Bus	2	2	-	
2.	Fick Up	3	3	-	
3.	Truck	1	-	1	
4.	Roda 3	3	2	1	
5.	Roda 2	22	19	3	

Adapun sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha produksi perikanan yang telah dibangun dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Sodohoa Kec. Kendari Barat.
2. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kel. Puday Kec. Abeli.
3. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) di Kel. Rahandauna, Kec. Poasia.
4. Unit Perbenihan Rakyat (UPR) di Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga.
5. Hatchery Skala Rumah Tangga di Kel. Sambuli, Kec. Abeli.
6. Depo Pemasaran Rumput Laut di Kel. Tondonggeu, Kec. Abeli.
7. Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan di Kel. Sanua Kec. Kendari Barat
8. Pabrik Tepung Ikan di Kel. Tondonggeu Kec. Abeli

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas.

Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kota, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari pencapaian target kinerja selama periode Renstra tahun sebelumnya (2013 – 2017) dapat dijelaskan melalui Tabel 2.7.

Berdasarkan pada tabel 2.7, dapat dilihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari selama masa Renstra tahun sebelumnya telah mencapai setiap target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan Perikanan Tangkap melalui pemberian bantuan sarana penangkapan ikan dan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan, serta peningkatan dan pengembangan budidaya perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan sehingga dapat memaksimalkan produksi hasil tangkapan dan budidaya perikanan. Namun di dalam tabel 2.7 khususnya pada tingkat capaian target produksi pada sektor perikanan budidaya masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 170 hingga 240 ton di akhir masa renstra tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kegiatan pemanfaatan lahan budidaya air tawar, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan, serta maraknya alih fungsi lahan budidaya tambak. Mengingat potensi lahan budidaya perikanan yang cukup besar maka kedepannya sangat diperlukan sentuhan program dan kegiatan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam rangka mendukung program nasional peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi budidaya perikanan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2013-2017 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung tercapainya target kinerja, dijabarkan dalam tabel 2.8.

Berdasarkan Pada tabel 2.8 maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio antara anggaran dan realisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari pada periode tahun sebelumnya (2013-2017) sebagai berikut:

1. Pada pos anggaran Pendapatan diperoleh rata-rata rasio antara target pendapatan dan realisasi pendapatan mencapai rata-rata 100% selama masa periode renstra OPD tahun sebelumnya.
2. Pada Pos Anggaran Belanja diperoleh rata-rata rasio untuk realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa sebesar 95,69 % dengan rata-rata anggaran per tahun sebesar Rp. 3.4 milyar guna membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana

kantor serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan bagi masyarakat.

3. Pada Pos Anggaran Belanja Modal diperoleh rata rasio Realisasi dan Anggaran sebesar 97,04% dengan guna membangun sarana dan prasarana kantor seperti Balai Benih Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, serta pengadaan kendaraan operasional kantor.

Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun (periode 2012-2017) adalah sebagai berikut :

- 1). Tercapainya peningkatan produksi perikanan sebesar 27.000 ton.
- 2). Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.
- 3). Tercapainya peningkatan ekspor hasil-hasil perikanan.
- 4). Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta terselenggaranya aktivitas kantor.
- 5). Tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan.
- 6). Tercapainya penyerapan tenaga kerja.
- 7). Tercapainya target peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor Kelautan dan Perikanan.
- 8). Tercapainya peningkatan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan daerah.
- 9). Tercapainya optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.
- 10). Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi terkait.

2.3.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Beragam masalah yang dihadapi dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota maupun provinsi, tetapi dari hasil musranbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan SKPD di tingkat Provinsi. Harapan dari kami SKPD tingkat Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kota dan Provinsi.
2. Belum optimalnya pencapaian kinerja pelaporan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, masih

rendahnya kualitas SDM aparatur dalam hal penyusunan pelaporan, belum adanya format yang jelas dan baku dalam hal permintaan data dan laporan dari instansi terkait. Harapan SKPD agar dilakukan peningkatan SDM aparatur, serta ditetapkan format yang baku dalam hal penyampaian data dan pelaporan.

3. Masih banyaknya program dan kegiatan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang belum dapat di alokasikan ke SKPD Kota Kendari disebabkan oleh kurangnya data dukung pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, terlambatnya akses informasi, serta lambat penyampaian usulan program dan kegiatan daerah. Harapan ke depan agar pemerintah daerah melalui SKPD lebih meningkatkan kegiatan konsultasi program dan kegiatan, sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan, akses informasi yang cepat dan tepat, serta penyediaan data dukung yang lengkap (Dokumen perencanaan SKPD).
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang masih sering tidak sesuai jadwal yang disebabkan oleh terlambatnya petunjuk dan pedoman teknis kegiatan, terlambatnya pencairan dana, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Harapan kedepan agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan maupun pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Tabel. 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Kendari

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton).	-	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-	28.000	30.000	30.500	31.000	32.000	30.887,81	30.887,81	32.290,65	33.022,50	34.261,68	100,26	102,96	105,87	106,52	107,07
2.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton).	-	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	190	200	200	210	250	170,95	170,95	177,77	178,30	248,40	89,97	85,47	88,88	84,90	99,36
3.	Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kap/thn).	-	Jumlah Konsumsi Ikan	-	43	43	45	48	55	42,15	42,33	42,49	45,22	52,49	98,02	98,44	94,42	94,21	95,44
4.	Jumlah PAD Bidang Kelautan dan Perikanan (Rp). (juta)	-	Jumlah PAD Bidang Kelautan dan Perikanan	-	550,24	600	600	600	625	550,31	601,11	622,71	665,8	671,13	100,01	100,18	103,78	110,97	107,38

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Kendari Tahun 2013 – 2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	550.240.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	625.000.000	550.309.000	601.110.000	622.707.000	665.801.000	671.128.400	100,01	100,19	103,78	110,97	107,38	595.048.000	622.211.080
Pendapatan Asli Daerah	550.240.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	625.000.000	548.636.000	598.080.000	621.587.000	664.251.000	667.908.400	99,71	99,68	103,60	110,71	106,87	595.048.000	620.092.480
- Pendapatan Retribusi Daerah	548.240.000	590.000.000	600.000.000	600.000.000	625.000.000	546.236.000	588.080.000	611.587.000	659.151.000	664.854.000	99,63	99,67	101,93	109,86	106,38	592.648.000	613.981.600
- Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000	10.000.000	0	0	0	2.400.000	10.000.000	10.000.000	5.100.000	3.054.400	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	6.110.880
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0	0	1.673.000	3.030.000	1.120.000	1.550.000	3.220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.118.600
- Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	1.673.000	3.030.000	1.120.000	1.550.000	3.220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.118.600
BELANJA	9.907.246.467	9.538.243.300	11.323.022.029	6.733.912.650	7.053.469.000	9.529.613.697	8.583.918.043	10.907.694.169	6.453.514.457	6.428.190.884	96,19	89,99	96,33	95,84	91,14	8.911.178.689	8.380.586.250
Belanja Operasi	6.644.058.361	8.219.208.000	7.530.720.804	6.076.632.000	6.986.245.250	6.405.553.107	7.240.728.293	7.158.571.669	5.799.371.457	6.368.190.884	96,41	88,10	95,06	95,44	91,15	7.091.372.883	6.594.483.082
- Belanja Pegawai	3.187.066.316	3.319.833.000	3.664.292.304	4.007.664.000	4.010.666.000	2.985.231.633	3.092.287.039	3.318.891.819	3.750.394.053	3.496.181.425	93,67	93,15	90,57	93,58	87,17	3.637.904.324	3.328.597.194
- Belanja Barang dan Jasa	3.456.992.045	4.899.375.000	3.866.428.500	2.068.968.000	2.975.579.250	3.420.321.474	4.148.441.254	3.839.679.850	2.048.977.404	2.872.009.459	98,94	84,67	99,31	99,03	96,52	3.453.468.559	3.265.885.888
BELANJA MODAL	3.263.188.106	1.319.035.300	3.792.301.225	657.280.650	67.223.750	3.124.060.590	1.343.189.750	3.749.122.500	654.143.000	60.000.000	95,74	101,83	98,86	99,52	89,25	1.819.805.806	1.786.103.168
- Belanja Peralatan dan Mesin	416.935.106	339.970.000	750.764.975	81.175.000	60.000.000	416.773.490	335.868.200	743.250.000	81.100.000	60.000.000	99,96	98,79	99,00	99,91	100,00	329.769.016	327.398.338
- Belanja Gedung dan Bangunan	2.547.790.000	916.540.300	584.923.750	357.365.000	7.223.750	2.425.049.700	907.596.550	562.385.000	356.365.000	0	95,18	99,02	96,15	99,72	0,00	882.768.560	850.279.250
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	298.463.000	62.525.000	2.456.612.500	218.740.650	0	282.237.400	99.725.000	2.443.487.500	216.678.000	0	94,56	159,50	99,47	99,06	0,00	607.268.230	608.425.580
TOTAL ANGGARAN	9.357.006.467	8.938.243.300	10.723.022.029	6.133.912.650	6.428.469.000	8.979.304.697	7.982.808.043	10.284.987.169	5.787.713.457	5.757.062.484	95,96	89,31	95,92	94,36	89,56	8.316.130.689	7.758.375.170

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Pada bagian sub bagian ini akan dijelaskan mengenai tantangan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dalam memberikan pelayanan sebagai berikut antara lain :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, Sarana Pengolahan dan pemasaran hasil produk olahan perikanan, sarana penangkapan ikan, dan sarana budidaya perikanan.
2. Penurunan kualitas lingkungan budidaya serta wilayah pesisir.
3. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya ikan dan budidaya tambak untuk kegiatan non sektor perikanan.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan
5. Masih Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (KUB Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
6. Belum optimalnya penerapan program-program pemerintah seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), dan higienitas serta sanitasi dalam meningkatkan produksi budidaya serta produk olahan hasil perikanan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan potensi perikanan di daerahnya sesuai dengan pembangian kewenangan dalam UU No.23 Tahun 2014.
2. Keberadaan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta lembaga penunjang lain yang mendukung pengembangan usaha perikanan
3. Niat Baik Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung pertumbuhan investasi terutama melalui kemudahan dan inovasi sektor perizinan
4. Tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk perikanan dari Kota Kendari baik dalam bentuk segar atau hasil olahan pada pasar domestik, antar pulau dan ekspor.
5. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Kendari.
6. Masih Luasnya Potensi Lahan Budidaya khususnya perikanan darat (kolam) sehingga memungkinkan masyarakat untuk berusaha di bidang budidaya perikanan melalui pemanfaatan lahan-lahan pekarangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan hasil olahan. Oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan, baik dari segi penangkapan ikan dan budidaya perikanan maupun dari segi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Maraknya aktifitas alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan untuk kegiatan non perikanan.
3. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor kelautan dan perikanan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan
4. Belum semua nelayan mampu mengakses informasi dan menerapkan teknologi perikanan serta masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
5. Belum optimalnya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan dalam mencapai suatu tujuan pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran masa depan yang ingin dicapai sebuah

organisasi atau instansi pemerintah yang di jelaskan pada saat sekarang. Impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor kelautan dan perikanan menuju kondisi yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang dan akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kota Kendari dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022

“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS
EKOLOGI , INFORMASI DAN TEKNOLOGI ”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Misi Pertama: Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagiwarga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kotautamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan terminal) melalui implementasi manajemen logistik kota. Penggalan potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep logistik yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat canggih TI (teknologi informasi).

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan ketahanan pangan,
4. Peningkatan kualitas dan prestasi generasi muda
5. Peningkatan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran
6. Peningkatan penanganan PMKS
7. Penurunan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha
8. Peningkatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak
9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah

10. Melestarikan budaya lokal
11. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
12. Peningkatan arus perdagangan nasional dan antar pulau dari dan menuju Kota Kendari
13. Peningkatan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barangdan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif
14. Peningkatan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global,
15. Peningkatan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global
16. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
17. Memantapkan kemandirian keuangan daerah berbasis teknologi informasi

Misi Kedua: Menata wajah Kota Kendari, dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, serta melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan,
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau
3. Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana
4. Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
5. Peningkatan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
6. Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan

Misi Ketiga: Pembangunan Infrastruktur, dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, dan drainase) dan utilitaskota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien, yang dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota
2. Peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu
3. Peningkatan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi yang berlaku, maka diperoleh kesesuaian baik dalam visi misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Permasalahan pelayanan DKP Kota Kendari berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKP Kota Kendari	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas sentra – sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan.	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan• Penurunan Kualitas Lingkungan Budidaya serta belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya• Kurang tersedianya benih ikan unggul• Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan• Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas Kelembagaan KUB masih rendah dan nelayan masih menggunakan peralatan yang sederhana• Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya• Penerapan Sistem CBIB dan CPIB belum optimal• SDM Nelayan/ pembudidaya masih kurang dan alih teknologi yang lambat.• Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana pengolahan serta terbatasnya pemahaman tentang diversifikasi hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas kelembagaan KUB Nelayan serta pemberian Bantuan sarana penangkapan ikan, alat bantu penangkapan dan alat tangkap yang ramah lingkungan.• Menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya perikanan.• Pemberian bantuan Benih Ikan yang unggul sesuai standar SNI.• Bimtek/pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.• Pembinaan dan introduksi teknologi hasil perikanan
2.	Meningkatnya Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya biaya operasional produksi dibanding dengan harga penjualan hasil produksi yang fluktuatif.• Terbatasnya Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya bantuan modal dan subsidi guna menekan tingginya biaya operasional• Rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha.	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan program penggunaan pakan mandiri bagi pembudidaya ikan• Memberikan bantuan BBM bersubsidi bagi Nelayan• Fasilitasi

				pemberian Bantuan sertifikat Hak atas Tanah (SEHAT) nelayan dan pembudidaya ikan.
3.	Meningkatnya Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman masyarakat tentang manfaat konsumsi ikan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Gemar Ikan Lomba Masak Serba Ikan
4.	Meningkatnya Mutu keamanan produk perikanan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Relatif rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang higienis. Masih ada produk hasil perikanan yang belum memiliki sertifikat izin standar dan sertifikat halal. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan Pengawasan dan pembinaan terhadap mutu hasil perikanan Fasilitasi terhadap KUB pengolah ikan untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi. Gelar operasi izin usaha perikanan.
5.	Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penurunan luas areal tanaman mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir Maraknya kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan pemanfaatan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi tanaman mangrove Program Tracking Mangrove Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Tabel 3.2.

Permasalahan pelayanan DKP Kota Kendari berdasarkan sasaran renstra DKP Provinsi beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan DKP Kota Kendari	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan • Penurunan Kualitas Lingkungan Budidaya serta belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya • Kurang tersedianya benih ikan unggul • Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan • Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kelembagaan KUB masih rendah dan nelayan masih menggunakan peralatan yang sederhana • Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya • Penerapan Sistem CBIB dan CPIB belum optimal • SDM Nelayan/ pembudidaya masih kurang dan alih teknologi yang lambat. • Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana pengolahan serta terbatasnya pemahaman tentang diversifikasi hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas kelembagaan KUB Nelayan serta pemberian Bantuan sarana penangkapan ikan, alat bantu penangkapan dan alat tangkap yang ramah lingkungan. • Menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya perikanan. • Pemberian bantuan Benih Ikan yang unggul sesuai standar SNI. • Bimtek/pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. • Pembinaan dan introduksi teknologi hasil perikanan
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya nilai jual dan kualitas produk olahan hasil perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana. • Rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan • Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolah hasil perikanan dalam pengolahan dan pemanfaatan sarana pengolahan hasil perikanan yang modern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya permintaan masyarakat Pengolah untuk mendapatkan pelatihan. • Bertambahnya minat masyarakat di bidang pengolahan hasil perikanan • Pembinaan terhadap KUB Pengolah hasil perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah pembangunan yang mempunyai peran cukup strategis dalam memberikan pelayanan berupa pusat pendidikan, perdagangan dan jasa. Ditinjau dari segi kewilayahan, maka Kota Kendari mempunyai peranan strategis dalam pelayanan SKPD antara lain

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010 – 2030 disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang dan dalam pengembangan ruang Kota Kendari harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan terhadap aspek fisik dasar, sosial kependudukan dan ekonomi, maka tujuan dari penentuan struktur ruang kota adalah untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kota sesuai dengan fungsi dan hirarki sistem pelayanan kota. Adapun unsur pembentuk struktur ruang kota diwujudkan pusat-pusat pelayanan utama dan didukung oleh sistem jaringan jalan untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan yang ada.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kota Kendari sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN Kota kendari, fungsi dan peran Kota Kendari merupakan Simpul Utama Transportasi, Pusat Kegiatan Industri dalam skala nasional dan pusat kegiatan ekspor impor. Selain sebagai Pusat Pemerintahan bagi Propinsi Sulawesi Tenggara, penetapan Kota Kendari sebagai PKN merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh kuat didalam merumuskan konsep pengembangan struktur ruang selain mempertimbangkan potensi yang ada, baik aspek fisik, kependudukan dan ekonomi.

Pengembangan struktur ruang kota diarahkan untuk menampung pusat-pusat pertumbuhan kota yang didukung oleh kerangka jaringan jalan yang dapat memberikan kemudahan aksesibilitas antar pusat kota dan kemudahan aksesibilitas dari kawasan permukiman terhadap pusat-pusat kegiatan kota baik pusat utama (primer) maupun pusat-pusat hirarki dibawahnya.

Kota Kendari yang didominasi oleh dataran yang memungkinkan pengembangan kota ke segala arah, yang diperkuat oleh sistem jaringan jalan yang telah terbentuk yang mendorong perkembangan kota secara konsentris sehingga

MODEL KONSENTRIS menjadi konsep pengembangan kota yang direkomendasikan. Pengembangan pola konsentris didukung oleh pengembangan pola jaringan jalan yang membentuk “Radial Konsentris” yang akan membuka akses dari pusat kota ke segala arah dan dari pusat-pusat primer lainnya yang akan berfungsi sebagai “satelit” bagi pusat kota, yang akan terhubung dengan jaringan jalan lingkaran luar yang berbentuk radial.

Pengembangan jaringan jalan lingkar luar Kota Kendari memperkuat pembentukan pola konsentris yang akan menghubungkan bagian terluar Kota Kendari yang menyeberangi Kawasan Timur Teluk dengan akan dibangunnya jembatan penghubung dari Abeli ke Kota Lama.

Pusat Kota akan terintegrasi dengan CBD dan kawasan wisata akan menjadi inti kota yang terletak dipusat simpul transportasi dan ditengah-tengah kawasan teluk sehingga secara lokasi memiliki nilai strategis yang akan memudahkan untuk dijangkau dari seluruh bagian Kota Kendari.

Jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan – Kota Kendari – Konawe Utara, Pusat Kota – Pantai nambo – Konawe Selatan, Pusat Kota – Konawe Selatan melalui jalur barat berfungsi sebagai pembentuk sistem konsentris, sedangkan jalan lingkar selatan, yang akan menghubungkan pusat-pusat baru di kawasan timur yaitu kawasan pelabuhan, Kota Lama, Pusat Industri, Terminal Type A sampai Kecamatan Puuwatu akan berfungsi sebagai pembentuk sistem radial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengembangan struktur ruang Kota Kendari adalah sebagai berikut :

- Pusat Pelayanan Kota : Pusat Kota, Kawasan Pusat Bisnis (CBD), Pusat Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Terminal dan Kawasan Pelabuhan.
- Sub-Pusat Pelayanan Kota : Kota Lama, Pusat Kecamatan Abeli, Pusat Kecamatan Poasia, Pusat Kecamatan Kambu, Pusat Kecamatan Baruga, Pusat Kecamatan Kadia, Pusat Kecamatan Wua-wua, Pusat Kecamatan Puuwatu dan Pusat Kecamatan Mandonga.
- Pusat Lingkungan : Simpul-simpul kegiatan di Kawasan permukiman/ Pusat Kelurahan.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu penetapan Kota Kendari sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) akan sangat mempengaruhi struktur ruang dan Pola ruang Kota Kendari dimasa yang akan datang. Khususnya pada Pola ruang ruang Kota Kendari, kebijakan penetapan Kota Kendari, sebagai PKN akan sangat berimplikasi pada ruang – ruang yang harus disediakan dalam rangka menunjang fungsi yang akan diemban oleh Kota Kendari.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, program pemanfaatan ruang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik dari pusat maupun di daerah secara terpadu dan tertuang dalam dokumen RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam RTRW, terkait dengan permasalahan, potensi dan rencana pengembangan suatu kawasan dalam wilayah kota kendari, maka beberapa indikasi program dan kegiatan muncul dalam rangka mewujudkan RTRW Kota Kendari, yang terdiri dari indikasi program struktur ruang dan pola ruang.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan masa yang akan datang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan di atas instrument analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan dan Pembudidaya ikan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
2. Pemanfaatan lahan budidaya belum optimal serta Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya serta lahan potensial tambak bandeng, udang dan rumput laut
3. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan/rumput laut sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan serta kesulitan memperoleh bibit yang unggul.
4. Kenaikan harga BBM khususnya solar telah mengakibatkan kenaikan ongkos produksi penangkapan ikan sebesar 60 persen, sehingga nelayan banyak mengalami kerugian karena nilai hasil tangkapan tidak sebanding dengan besarnya biaya produksi.
5. Kurangnya pengetahuan nelayan dalam manajemen pendapatan/penghasilan yang diperoleh serta kurangnya modal sehingga banyak nelayan yang terjatuh hutang oleh para tengkulak/kredit swasta dengan bunga yang cukup tinggi.
6. Kurangnya keterampilan nelayan serta lambatnya alih teknologi bagi nelayan sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana produksi belum optimal.
7. Sarana penangkapan (armada, alat tangkap, alat bantu) yang digunakan oleh nelayan di Kota Kendari masih kurang.
8. Proses penanganan hasil tangkapan di atas kapal masih sederhana baik sarana yang digunakan maupun cara penanganannya (sistem palkanisasi).
9. Sarana dan prasarana penunjang produksi seperti Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI), Pabrik Tepung Ikan belum optimal.

10. Unit Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) /Kota Kendari belum berproduksi maksimal khususnya dalam menghasilkan benih ikan karena masih kurangnya sarana prasarana pendukung serta akses jalan yang belum memadai.
11. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan.
12. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
13. Belum adanya penetapan kawasan konservasi daerah sehingga jumlah kawawasan potensial sebagai konservasi mangrove yang rusak terus meningkat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari adalah:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Kota Kendari

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	45.000	47.250	49.000	51.000	53.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari telah menetapkan strategik berdasarkan analisis faktor pendorong /pendukung lingkungan organisasi perangkat daerah.

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Kendari selama 5 tahun kedepan diarahkan pada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat (Nelayan, Pembudidayaa, pengolah dan pemasar), peningkatan akses teknologi serta peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan guna mencapai tujuan organisasi yaitu peningkatan ketahanan pangan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka, organisasi perangkat daerah sering kali dhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ditetapkan menjadi isu-isu strategis dalam pelayanan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya misalnya kurangnya sarana prasarana, menurunnya kualitas lahan budidaya, lemahnya kualitas kelembagaan KUB, lambatnya akses teknologi masyarakat hingga masalah permodalan.

Adanya berbagai permasalahan tersebut di atas, memacu pembangunan Kelautan dan di Kota Kendari untuk lebih mengoptimalka potensi melalui program-prpogram penigkatan Proproduktifitas kelautan dan perikanan.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI			
Misi 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk hasil Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kerja merupakan upaya mengimplementasikan sasaran dan merupakan suatu proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan periode 2018-2022, secara jelas disajikan pada Lampiran tabel 6.1. Indikasi Rencana Program Serta Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	75 %	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDKP	79 %	80%	85%	89%	90%	95%	100%
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan aturan dan hukum dalam pemanfaatan SD perikanan	70 %	75%	80%	90%	95%	97%	97%
4.	Meningkatnya produksi hasil budidaya perikanan	85 %	88%	90%	92%	95%	98%	98%
5.	Tersedianya kawasan ekowisata perikanan	95%	97%	98%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya peran penyuluh perikanan	80,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya produk nilai tambah hasil perikanan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8.	Meningkatnya statistik kelautan dan perikanan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PEMERINTAH KOTA KENDARI
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
Dinas Kelautan dan Perikanan
TAHUN : 2018 - 2022

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : 8

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	Urusan Pilihan													
3.1	Kelautan dan Perikanan													
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	552.075.000	100 %	588.900.000	100 %	608.000.000	100 %	676.000.000	100 %	686.000.000	DKPP	
1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tersedianya jasa surat menyurat	100 %	3.000.000	100 %	4.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	6.000.000		
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 - Tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik 3 Tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik	100 % 100 %	71.800.000	100 % 100 %	72.000.000	100 % 100 %	75.000.000	100 % 100 %	75.000.000	100 % 0 %	75.000.000		
1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan 7 -	100 % 0 -	17.375.000	100 % 0 -	17.500.000	100 % 0 -	18.000.000	100 % 0 -	18.000.000	100 % 0 -	20.000.000		
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 - Terlaksananya pengelolaan adm. Keuangan 8 Terlaksananya pengelolaan adm. Keuangan	100 % 100 %	95.100.000	0 % 100 %	0	0 % 100 %	0	0 % 100 %	0	0 % 0 %	0		
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	1 - Terpenuhinya kebutuhan ATK	100 %	24.000.000	100 %	26.400.000	100 %	28.000.000	100 %	31.000.000	100 %	35.000.000		
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 - Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100 %	27.800.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000		
1.1.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD														
Halaman : 1														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	1 - Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	38.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	DKPP
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 - Terjalinnya sinkronisasi program & kegiatan	100 %	220.000.000	100 %	240.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	DKPP
1.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 - Terjalinnya sinkronisasi program & kegiatan	100 %	53.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	DKPP
1.1.1.1.21	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1 - Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0 tahun	0	1 tahun	96.000.000	1 tahun	96.000.000	1 tahun	98.000.000	1 tahun	100.000.000	DKPP
		Total:		552.075.000,00		588.900.000,00		608.000.000,00		676.000.000,00		686.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	236.000.000	100 %	803.000.000	100 %	556.000.000	100 %	266.000.000	100 %	283.000.000	
1.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	1 Tersedianya gedung kantor DKP yang memadai	0 paket	0	1 paket	85.000.000	1 paket	230.000.000	0 paket	0	0 paket	0	DKPP
1.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 - Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2 unit	60.000.000	3 unit	380.000.000	2 unit	60.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	DKPP
1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 - Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0 set	0	4 set	120.000.000	0 set	0	0 set	0	1 set	15.000.000	DKPP
1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	1 - Tersedianya mebeleur kantor	1 unit	5.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	15.000.000	10 unit	25.000.000	2 unit	15.000.000	DKPP
1.1.1.2.11	Pengadaan Komputer dan Attachment	1 Tersedianya Komputer +Attachment	2 unit	21.000.000	2 unit	30.000.000	4 unit	75.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	DKPP
1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tersedianya gedung kantor yang baik	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	30.000.000	DKPP
		22 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 2													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	110.000.000	1 tahun	115.000.000	1 tahun	120.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	DKPP	
1.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	DKPP	
1.1.1.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1 Tersedianya kendaraan dinas yang baik	0 tahun	0	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	8.000.000	DKPP	
		44 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Total: Selisih:		236.000.000,00 0,00		803.000.000,00 0,00		556.000.000,00 0,00		266.000.000,00 0,00		283.000.000,00 0,00		
1.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	1 Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	0 %	0	0 %	0	100 %	45.000.000	0 %	0	100 %	7.500.000	DKPP	
1.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 unit	0	0 unit	0	60 unit	45.000.000	0 unit	0	25 unit	7.500.000		
		Total: Selisih:		0,00 0,00		0,00 0,00		45.000.000,00 0,00		0,00 0,00		7.500.000,00 0,00		
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase Cakupan Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100 %	25.000.000	100 %	40.000.000	100 %	115.000.000	100 %	50.000.000	100 %	130.000.000	DKPP	
		5 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			0		0		0		0		0		
1.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD	2 orang	25.000.000	2 orang	40.000.000	2 orang	40.000.000	2 orang	50.000.000	2 orang	50.000.000		
		3 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.1.5.4	Studi penerapan teknologi kelautan dan perikanan	1 Terlaksananya studi banding teknologi bidang KP	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	75.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	80.000.000	DKPP	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD														Halaman : 3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		4 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
		Total: Selisih:		25.000.000,00 0,00		40.000.000,00 0,00		115.000.000,00 0,00		50.000.000,00 0,00		130.000.000,00 0,00	
1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	
1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kegiatan SKPD	2 kegiatan	60.000.000	2 kegiatan	60.000.000	2 kegiatan	75.000.000	2 kegiatan	80.000.000	2 kegiatan	80.000.000	DKPP
		Total: Selisih:		60.000.000,00 0,00		60.000.000,00 0,00		75.000.000,00 0,00		80.000.000,00 0,00		80.000.000,00 0,00	
1.1.1.7	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	1 Persentase Perkembangan Informasi Kota Kendari	100 %	30.000.000	100 %	100.000.000	100 %	160.000.000	100 %	130.000.000	100 %	240.000.000	
1.1.1.7.1	Pameran Pembangunan	1 Terlaksananya Pameran Pembangunan	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	DKPP
1.1.1.7.2	Expo Produk Kelautan dan Perikanan	1 Produk kelautan dan perikanan Kota Kendari makin dikenal	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
1.1.1.7.3	Festival Nelayan	1 Terlaksananya festival nelayan	0 %	0	0 %	0	100 %	80.000.000	0 %	0	1 %	90.000.000	DKPP
1.1.1.7.4	Konteks Ikan Hias	1 Meningkatnya minat budidaya ikan hias	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	35.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
		Total: Selisih:		30.000.000,00 0,00		100.000.000,00 0,00		160.000.000,00 0,00		130.000.000,00 0,00		240.000.000,00 0,00	
1.2.1.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir	100 %	2.420.000.000	100 %	2.625.000.000	100 %	2.570.000.000	100 %	2.870.000.000	100 %	3.205.000.000	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.15.1	Penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat pesisir	1 - Tersedianya sarana pemberdayaan masyarakat pesisir	60 unit	2.400.000.000	60 unit	2.500.000.000	60 unit	2.500.000.000	60 unit	2.700.000.000	60 unit	3.000.000.000	DKPP
1.2.1.15.2	Revitalisasi masyarakat wilayah pesisir	1 - Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat pesisir	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	50.000.000	DKPP
1.2.1.15.3	Pemberdayaan perempuan pesisir	1 Meningkatnya peran wanita pesisir	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
1.2.1.15.4	Penyusunan profil koperasi bidang perikanan	1 Tersedianya profil koperasi perikanan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	20.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	DKPP
1.2.1.15.5	Rehabilitasi ekosistem pesisir (penanaman mangrove, transplantasi karang, dll)	1 Meningkatnya fungsi ekosistem pesisir	0 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	75.000.000	DKPP
		Total: Selisih:		2.420.000.000,00 0,00		2.625.000.000,00 0,00		2.570.000.000,00 0,00		2.870.000.000,00 0,00		3.205.000.000,00 0,00	
1.2.1.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	1 - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SD KP	100 %	24.000.000	100 %	25.000.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	DKPP
1.2.1.16.2	Operasi reguler izin usaha perikanan	1 Terlaksananya operasi reguler izin usaha perikanan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	DKPP
		Total: Selisih:		24.000.000,00 0,00		25.000.000,00 0,00		28.000.000,00 0,00		30.000.000,00 0,00		32.000.000,00 0,00	
1.2.1.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	17 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aturan & hukum dlm pemanfaatan SD perikanan	0 %	0	100 %	100.000.000	100 %	97.000.000	100 %	113.000.000	100 %	140.000.000	
1.2.1.17.2	Penyusunan Raperda bidang KP			0		50.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000	DKPP
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 5													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Tersusunnya Raperda bidang KP	0 kegiata n		1 kegiata n		1 kegiata n		1 kegiatan		1 kegiatan		
1.2.1.17.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang KP			0		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	DKPP
		1 Tersosialisaskannya peraturan perundang-undangan bidang KP	0 kegiata n		1 kegiata n		1 kegiata n		1 kegiatan		1 kegiatan		
1.2.1.17.4	Penyediaan bahan informasi/reklame bidang KP			0		15.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000	DKPP
		1 Tersedianya sarana informasi bidang KP	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.17.5	Bersih pantai dan laut teluk Kendari			0		10.000.000		0		0		15.000.000	DKPP
		1 Terciptanya lingkungan laut/teluk yang bersih	0 kegiata n		1 kegiata n		0 kegiata n		0 kegiatan		1 kegiatan		
		Total:		0,00		100.000.000,00		97.000.000,00		113.000.000,00		140.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan			460.000.000		2.637.000.000		3.690.000.000		4.761.000.000		4.988.000.000	
		1 Meningkatnya produksi hasil budidaya perikanan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul			10.000.000		12.000.000		15.000.000		16.000.000		18.000.000	DKPP
		1 Tersedianya bibit ikan yang berkualitas	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.4	Penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana BBIAT, UPR/HSRT			0		800.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000	DKPP
		1 Tersedianya sarana dan prasarana BBIAT, UPR/HSRT	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.5	Pengembangan sarana dan parasarana budidaya perikanan			450.000.000		475.000.000		500.000.000		650.000.000		750.000.000	DKPP
		1 Meningkatnya sarana dan prasarana budidaya bagi masyarakat	1 %		1 %		1 %		1 %		1 %		
1.2.1.20.6	Pengembangan penyediaan calon induk ikan unggul (air tawar, air payau, air laut)			0		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	DKPP
		1 Tersedianya induk ikan yang berkualitas	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.7	Pengembangan kebun bibit Rumput Laut			0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000	DKPP
		1 Tersedianya bibit Rumput Laut yang berkualitas	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.8	Pengadaan/pengembangan bibit/ benih ikan hias			0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	DKPP
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 6													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Tersedianya bibit ikan hias yang berkualitas	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.9	Diseminasi teknologi bidang perbenihan (untuk UPR)			0		0		25.000.000		30.000.000		35.000.000	DKPP
		1 Tersebar nya informasi terbaru/ inovasi budidaya	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
1.2.1.20.10	Demplot budidaya ikan			0		0		35.000.000		40.000.000		35.000.000	DKPP
		1 Bertambahnya jumlah pembudidaya dan peningkatan produksi	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
1.2.1.20.11	Rehabilitasi/revitalisasi sarana prasarana budidaya perikanan			0		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000	DKPP
		1 Meningkatnya sarana prasarana budidaya perikanan	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.12	budidaya ikan di lahan pekarangan			0		250.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	DKPP
		1 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan untuk rumah tangga dan peningkatan pendapatan	0 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		
		Total: Selisih:		460.000.000,00 0,00		2.637.000.000,00 0,00		3.690.000.000,00 0,00		4.761.000.000,00 0,00		4.988.000.000,00 0,00	
1.2.1.21	Program pengembangan perikanan tangkap			800.000.000		1.900.000.000		2.450.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000	
		1 Meningkatnya produksi hasil tangkapan nelayan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.1.21.3	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan			0		0		0		0		0	DKPP
1.2.1.21.4	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan			0		0		0		0		0	DKPP
1.2.1.21.6	Penyediaan sarana prasarana Perikanan Tangkap			800.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	DKPP
		1 Tersedianya sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
1.2.1.21.7	Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana Perikanan Tangkap			0		400.000.000		450.000.000		500.000.000		600.000.000	DKPP
		1 Tersedianya sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 7													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Total: Selisih:		800.000.000,00 0,00		1.900.000.000,00 0,00		2.450.000.000,00 0,00		3.000.000.000,00 0,00		3.100.000.000,00 0,00	
1.2.1.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	22 - Meningkatnya peran penyuluh perikanan	100 %	75.000.000	100 %	190.000.000	100 %	245.000.000	100 %	360.000.000	100 %	270.000.000	
1.2.1.22.2	Penilaian lomba kelompok nelayan	1 Terlaksananya penilaian lomba bidang KP	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.3	Bimtek bidang kelautan dan perikanan	1 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan ASN dan masyarakat	2 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	75.000.000	2 kegiatan	80.000.000	2 kegiatan	80.000.000	DKPP
1.2.1.22.4	Temu usaha dan kemitraan antara nelayan dan pengusaha	1 Meningkatnya kemitraan KUB dengan pengusaha	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.5	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	1 Tersedianya sarpras bagi penyuluh perikanan	0 paket	0	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.6	Sosialisasi bidang kelautan dan perikanan	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.7	Pekan Agribisnis Nasional (PENAS)	1 Terlaksananya PENAS	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	120.000.000	0 kegiatan	0	DKPP
1.2.1.22.8	Pekan Daerah (PEDA)	1 Terlaksananya PEDA	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	DKPP
		Total: Selisih:		75.000.000,00 0,00		190.000.000,00 0,00		245.000.000,00 0,00		360.000.000,00 0,00		270.000.000,00 0,00	
1.2.1.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	23 - Meningkatnya produk nilai tambah hasil perikanan	100 %	75.000.000	100 %	1.215.000.000	100 %	1.565.000.000	100 %	1.490.000.000	100 %	1.700.000.000	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 8													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.23.2	Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	1 Tersedianya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	DKPP
1.2.1.23.3	Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan	1 Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	DKPP
1.2.1.23.4	Lomba Masak Serba Ikan	1 Konsumsi ikan (gemarikan) masyarakat meningkat	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	80.000.000	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	100.000.000	DKPP
1.2.1.23.5	Pengembangan kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Berkembangnya sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	135.000.000	1 paket	280.000.000	0 paket	0	0 paket	0	DKPP
Total:				75.000.000,00		1.215.000.000,00		1.565.000.000,00		1.490.000.000,00		1.700.000.000,00	
Selisih:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.25	Program Pengembangan Kawasan Ekowisata Perikanan	25 - Tersedianya kawasan ekowisata perikanan	0 %	0	100 %	1.105.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.685.000.000	100 %	2.200.000.000	
1.2.1.25.1	Pengembangan kawasan wisata kolam pemancingan	1 Peningkatan pendapatan pembudidaya dan tersedianya sarana wisata kolam	0 paket	0	1 paket	80.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	200.000.000	DKPP
1.2.1.25.2	Pengembangan kawasan wisata tracking mangrove	1 Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	0 paket	0	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	2.000.000.000	DKPP
1.2.1.25.3	forum perikanan budidaya kota kendari	1 Forum perikanan budidadaaya Kota Kendari Terorganisirnya kelompok pembudidaya	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	35.000.000	0 kegiatan	0	DKPP
Total:				0,00		1.105.000.000,00		1.300.000.000,00		1.685.000.000,00		2.200.000.000,00	
Selisih:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.26	Program Pengembangan Statistik Perikanan	26 - Meningkatnya statistik kelautan dan perikanan	0 %	0	100 %	155.000.000	100 %	172.000.000	100 %	190.000.000	100 %	195.000.000	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 9													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.26.1	Penyusunan buku statistik KP Kota Kendari	1 Tersedianya data statistik perikanan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	80.000.000	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	90.000.000	DKPP
1.2.1.26.2	Penyediaan sarana statistik KP	1 Tersedianya sarana statistik perikanan	0 paket	0	2 paket	65.000.000	2 paket	75.000.000	2 paket	85.000.000	2 paket	90.000.000	DKPP
1.2.1.26.3	Biaya operasional bagi petugas Datik DKP kota Kendari	1 Biaya operasional bagi petugas Datik DKP kota Kendari Tersedianya biaya operasional bagi petugas Datik perikanan	0 tahun	0	1 tahun	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	DKPP
Total:				0,00		155.000.000,00		172.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00	
Selisih:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Halaman : 10